

NASIONALISME DAN REVOLUSI: PENGALAMAN INDONESIA

Oleh: Aman¹

Abstract

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling kurang dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya konsepsi dan arus globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat, tidak dengan serta-merta membawa keruntuhan bagi nasionalisme. Sebaliknya, medan-medan ekspresi konsepsi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan komunikasi sosial, politik, kultur, dan bahkan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Malaysia, dan Indonesia. Nasionalisme tetap menjadi payung social-kultur negara-negara manapun untuk mengukuhkan integritasnya.

Kata Kunci: nasionalisme, konsepsi, historisitas, normativitas.

A. Pendahuluan

Sebagai suatu faham kebangsaan, nasionalisme merupakan “ruh” social-kultur untuk membentuk dan memperkokoh identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang telah memiliki martabat kemerdekaan. Meskipun telah sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif.

Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan *urgent* pada abad XX dalam proses *nation formation* negara-negara nasional modern di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi proses pengintegrasian sebagai nasion atau komunitas politik. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme terbentuk *counter-ideology* terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan realitas substantive tersebut. Dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif masa penjajahan menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnya. Nasionalisme adalah

¹ Pengajar tetap pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjang bangsa teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan Indonesia, sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempat kebersamaan segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama, etnik, adapt-istiadat, social-ekonomi, social-budaya, dan ideology politiknya yang pluralistic. Asas *pluralism* yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjuangan merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan konflik.

B. Konsepsi Nasionalisme

Nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata *nationalism* dan *nation* dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido Zernatto, (1944) dalam Sulfikar Amir (2007), kata *nation* tersebut berasal dari kata Latin *natio* yang berakar pada kata *nascor* yang bermakna 'saya lahir', atau dari kata *natus sum*, yang berarti 'saya dilahirkan'. Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada Abad Pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang)². Kata *renaisans* dalam bahasa Italia, *renaissance*, juga berasal dari akar kata latin yang sama, yakni dari *renascor* atau *renatus sum*, yang berarti saya lahir kembali dan saya dilahirkan kembali.³

Konsep *nation* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (Abadke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaissans timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama.⁴ Dari

² Sulfikar Amir, "Etimologi Nasionalisme". Dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0411/03/Bentara/1363295.htm>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007.

³ A. Daliman, "Harmonisasi Hubungan Nasionalisme dan Agama Menuju Indonesia Baru", dalam *Kearifan Sang Profesor: Bersuku Bangsa untuk Saling Mengenal*. Yogyakarta: UNY Press, 2006, hlm. 56. Perbedaan konsepsinya adalah bahwa renaissans melahirkan konsep-konsep kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, sedangkan nasionalisme menumbuhkan konsep-konsep politik dan ketatanegaraan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 57. Pada masa reformasi awal abad ke-16 merupakan reaksi pertama terhadap otoritas gereja atau agama.

sinilah makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. Pada sebuah artikel singkat yang ditulis Weber pada 1948, menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. Tidak tersedianya rujukan mapan yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan persepsi yang dangkal. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme.⁵

Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: “*nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*”. Bahwa nasionalisme merupakan suatu faham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.⁶ Konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada *nation state* atau negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi

⁵ Sulfikar Amir, *loc.cit.* Pesimisme Weber dapat saja benar. Tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis. Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak mudah mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti.

⁶ Hans Kohn, *Nationalism: Its Meaning and History*. New York: D. Van Nostrad Compay, Inc., 1965, hlm.9.

dan mobilisasi lewat organisasi.⁷ Hal ini sejalan dengan konsepsi Wikipedia Bahasa Melayu dalam Ensiklopedi Bebas yang mengidentifikasi bahwa nasionalisme merupakan suatu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan suatu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia.⁸

Hubungan antara nasionalisme dan *nation state*, sangat erat tidak dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah suatu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah negara. Dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga. Oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap negara. Bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar.⁹

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat.¹⁰ Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Benedict Anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, *imagined communities*. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam

⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran, dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media Press, 1994.1.

⁸ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2007. Di sini para nasionalis menganggap negara berdasarkan beberapa "legitimasi politik" (*political legitimacy*), yang mengacu pada teori romantisme yakni "identiti budaya", liberalisme yang menganggap legitimasi politik merupakan dari kehendak rakyat.

⁹ A. Daliman, *op.cit.*, hlm.59. Penggunaan konsep negara dan bangsa sering terjadi tumpang tindih dan dipergunakan secara bergantian lebih-lebih dalam kaitannya dengan masalah hubungan internasional. Negara selalu diartikan sebagai unit politik. Begitu pula konsep bangsa dalam beberapa hal dapat diartikan juga sebagai negara apabila tidak ada arti lain, kecuali dalam pengertian satu nasionalitas, negara nasional. Lihat juga Louis L Snyder, *The Meaning of Nationalism*. New Jersey: Rutgers University Press, 1954, hlm.17-18.

¹⁰ Eric Hobsbawn, dalam Sulfikar Amir, *loc.cit.*

membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan.¹¹

Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila konsep Anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadi sumber kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edward Said terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan masyarakat non-Barat.¹² Dalam bukunya, *Imagined Communities*, Anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa Eropa. Di sini letak problematika dari pandangan Anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.

Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II yang melanda negara-negara jajahan di Asia dan Afrika, yang karakternya ditandai oleh penyebaran nasionalisme melalui bahasa penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropolitan.¹³ Berdasarkan hal itu dapat ditekankan bahwa nasionalisme merupakan penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama. Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dari sudut pandang deterministik ini Gellner sampai pada satu argumen bahwa nasionalisme yang melahirkan bangsa, bukan sebaliknya.¹⁴

C. Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia

Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya.¹⁵ Tetapi secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu, melainkan selalu dialektis dan interpretatif, karena nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London: The Thetford Press, 1983, hlm. 49.

¹⁴ Sulfikar Amir, *loc.cit.*

¹⁵ Widodo Dwi Putro, "Nasionalisme Gelombang Keempat" *Kompas*, Rabu 11 Juni 2003.

melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling kurang ada lima fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia yakni sebagai berikut.

Pertama gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Boedi Oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jjakarta. Mengenai tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia, masih menjadi obyek perdebatan para ahli sejarah, karena Boedi Oetomo, tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi Jawa saja. Jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia.¹⁶

Kemudian pasca Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia, misalnya, Soepomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya, Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya.¹⁷

Tokoh nasional lain selain Soepomo, Hatta, Sutan Syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya, ketika mereka masih belajar di benua Eropa, atas beasiswa *politic-etis* balas budi-nya penjajah Belanda. Setelah selesai di PHS selesai 1921, kemudian Hatta meneruskan studi ke Belanda, masuk *Handels Hooge School* (Sekolah Tinggi Ekonomi) Refterdam. Selama di Belanda inilah Bung Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam perhimpunan Indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal. Bung Hatta dan mereka yang menempuh pendidikan Barat inilah di masa pra & pascakemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah masa depan Indonesia.¹⁸ Sementara Bung Karno sejak remaja, masa mahasiswa bahkan setelah tamat studinya, terus aktif menyerukan tuntutan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi-organisasi yang tumbuh pada awal abad ke-20.¹⁹

Kedua kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong

¹⁶ A. Fanar Syukri, Peran Pemuda dalam 20 Tahunan Siklus Nasionalisme Indonesia: (Refleksi 75 tahun Soempah Pemoeda, 1928-2003), dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Aman, "Pemikiran Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Azasi Manusia", dalam *MOZAIK*, 1 Juni 2006.

¹⁹ *Ibid.*

Java, Jong Celebes, Jong Sumatera dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928.

Ketiga masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemoeda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan *nation state* yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan, karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika Hatta, sebagai salah seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter.

Keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa orde-lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut dideskreditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi gerakannya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus lewat. Sementara para tentara diguritkan ke dalam tatanan masyarakat sipil lewat dwifungsi ABRI.

Kelima perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang.

D. Makna Sebuah Revolusi

Sejarah akan selalu mewarnai kehidupan seseorang. Dimensi ruang dan waktu, serta adanya suatu unsur perubahan menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kadangkala perubahan tersebut bersifat konstruktif, akan tetapi suatu saat menjadi sebaliknya yaitu bersifat destruktif. Akibatnya, sejarah menjadi sebuah memori yang dalam penafsiran antara individu yang satu dengan individu yang lain menjadi berbeda, walaupun pada konteks permasalahan yang sama.

Di samping itu, perlu dikemukakan bahwa situasi yang kompleks itu juga dapat ditinjau dari segi-segi insiden-insiden dan urutan-urutan insiden yang menentukan hubungan sebab akibat di antaranya adalah faktor-faktor variabel, apakah ekonomis, sosial, politik, atau keagamaan. Arti penting yang relatif harus diberikan kepada suatu faktor kausal tertentu atau suatu determinan dari gerakan sosial itu.²⁰

²⁰ Sartono Kartodirdjo. (1984). *The Peasant's Revolt of Banten 1888*. Ab. Hasan Basri. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal. 24.

Kontak kebudayaan mengakibatkan perubahan institusional yang dinamis, menimbulkan destrukturalisasi dan deferensiasi norma-norma, nilai-nilai, dan simbol-simbol. Analisisnya harus mencakup pula unsur-unsur yang esensial dari gerakan sosial, seperti tujuan-tujuan ideologi, kohesi golongan, organisasi, dan taktik. Dan akhirnya, transformasi politik yang terjadi selama abad XIX dapat dianalisa dari segi peralihan dari otoritas tradisional ke otoritas legal rasional, dan gerakan itu sendiri dari segi penyelenggaraan otoritas kharismatik.²¹

Perkembangan sejarah yang tampak dalam dinamika masyarakat timbul karena adanya kekuatan-kekuatan sejarah, baik yang berupa kekuatan alam, seperti misalnya ada dan tidaknya sumber-sumber ekonomis, pertumbuhan penduduk, kepentingan-kepentingan sebuah kelas, grup dan individu, penemuan teknologi baru, ideologi, kepercayaan, pengaruh-pengaruh dari luar, dan sebagainya.²²

Abad XIX merupakan suatu periode pergolakan atau revolusi sosial yang menyertai terjadinya perubahan sosial sebagai akibat dari pengaruh kolonialisme bangsa barat yang semakin kuat. Tergusurnya keseimbangan lama masyarakat tradisional tidak disangsikan lagi telah menimbulkan frustrasi dan rasa tersingkir yang umum, dan perasaan-perasaan itu jika dikomunikasikan, lalu berkembang menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas. Keadaan seperti itu tidak boleh tidak akan meledak apabila dapat difokuskan di bawah satu pemimpin yang mampu mengarahkan potensi agresif itu terhadap sasaran-sasaran tertentu yang dianggap bermusuhan atau menuju perwujudan gagasan-gagasan tentang *milenari*.²³

Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah apa yang akan dilakukan oleh kekuatan revolusioner setelah revolusi menentukan momentumnya dengan pergantian kekuasaan? Pengalaman kita menunjukkan, bahwa revolusi tidak memiliki basis ideologi dan konsep rekonstruksi dan restrukturisasi yang jelas. Akibatnya ketika kekuasaan politik jatuh, kekuatan revolusioner justru terjebak dalam tindakan membagi-bagi kekuasaan, lalu mereka bertikai sendiri antar sesamanya. Kemudian yang berhasil berkuasa, berusaha mengukuhkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Kekuatan revolusioner jadi terpecah, tercabik-cabik oleh nafsu kekuasaan yang tidak pernah merasa puas.²⁴ Akibatnya tujuan dan cita-cita dari sebuah revolusi menjadi bias kepentingan.

Secara umum sudah diketahui, bahwa gerakan-gerakan sosial sebagai suatu proses, merupakan satu hal yang sangat kompleks. Pendekatannya bisa dilakukan melalui pelbagai jalur metodologis atau perspektif teoretis dan yang terpenting adalah jalan atau perspektif ekonomis, sosiologis, politikologis, dan kultural-antropologis. Untuk tujuan-tujuan analitis, sejumlah aspek dari fenomena-fenomena yang kompleks itu dapat diisolasi, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan distorsi pada konteks yang bersangkutan. Kita dapat mengandaikan bahwa pertemuan beberapa faktor telah menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah. Sebelum

²¹ Sartono Kartodirdjo. (1984). *The Peasant's Revolt of Banten 1888*. Ab. Hasan Basri. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal.42.

²² Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal. 46.

²³ Sartono Kartodirdjo. (1984). *The Peasant's Revolt of Banten 1888*. Ab. Hasan Basri. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal. 15.

²⁴ Musa Asy'arie Kata Pengantar dalam buku *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. xi.

mencapai titik pertemuan itu, faktor-faktor itu masing-masing mengalami perkembangannya sendiri berdasarkan pertimbangan teoritis ini.²⁵

Berpikir sejarah mengharuskan kita mempertemukan dua pandangan yang saling bertentangan: pertama, cara berpikir yang kita gunakan selama ini adalah warisan yang tidak dapat disingkirkan, kedua, jika kita tidak berusaha menyingkirkan warisan itu, mau tidak mau kita harus menggunakan “*presentism*” yang melihat masa lalu dengan kaca mata sekarang.²⁶ Dalam konteks pemahaman terhadap kata revolusi harus dapat memadukan dua pandangan tersebut.

Dengan begitu terlihat bahwa istilah revolusi dan revolusi Indonesia telah mengalami pasang surut dalam pemaknaannya di dalam masyarakat kita. Dalam masa kemerdekaan 1945-1949, istilah revolusi dan revolusi Indonesia dipergunakan secara luas untuk menyebutkan perjuangan dan pergolakan pada masa itu. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang sangat kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II.²⁷

Dalam hubungan ini, hendaknya jangan dilupakan bahwa proses sekularisasi dan modernisasi sudah berlangsung pada saat kebangkitan gerakan nasionalis Indonesia dan pecahnya revolusi Indonesia. Apabila perbedaan itu dilihat tidak pertama-tama dalam aspek fungsionalnya, melainkan dalam aspek rasionalitasnya, maka kita dapat menyingkapkan perbedaan-perbedaan esensial antara harapan-harapan *mesianik* dan ideologi nasional dalam doktrin-doktrin politik.²⁸ Pada sisi lain, konstitusi yang berlaku tidak mampu memenuhi tuntutan perubahan cepat yang kompleks sehingga penguasa yang muncul cenderung ingin terus berkuasa dan menjadikan konstitusi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Revolusi seakan-akan mati suri karena tidak ditopang konstitusi yang memadai guna memenuhi tuntutan perubahan cepat yang kompleks, dan menyebabkan dalam budaya dan konflik politik hanya berorintasi pada kekuasaan.²⁹

Dari sudut pandang Islam klasik, revolusi berkonotasi buruk, yaitu menggulingkan tatanan yang didirikan orang yang beriman. Istilah itu sering digunakan untuk merujuk revolusi yang berarti: 1) fitnah, (godaan, hasutan, perselisihan menentang Allah); 2) *ma'siyah*, (ketidakpatuhan, pembangkangan, perlawanan, pemberontakan); 3) *riddah*, (berpaling atau memungguni). Pada perkembangan berikutnya, revolusi dimaknai pemberontakan terhadap Islam, yang mereka beri nama *kharij* (jamak dari

²⁵ Sartono Kartodirdjo. (1984). *The Peasant's Revolt of Banten 1888*. Ab. Hasan Basri. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal 24.

²⁶ Sam Wineburg. (2006). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts Charting the Future of Teaching the Past*. Ab. Masri Maris. *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 17-18.

²⁷ M.C. Ricklefs. (2005). *A History of Modern Indonesia Since 1200*. Ab. Satrio Wahono, Dkk. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi. Hal. 428.

²⁸ Sartono Kartodirdjo. (1984). *The Peasant's Revolt of Banten 1888*. Ab. Hasan Basri. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal. 20-21.

²⁹ Musa Asy'arie (2005). Kata Pengantar dalam buku *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. xi.

khawarij), yang berarti keluar. Sedangkan dalam wacana Islam kontemporer yang mendasarkan pada ilmu-ilmu sosial, revolusi dimaknai pemberontakan menentang otoritas yang terpilih. Istilah modern untuk revolusi dalam bahasa arab, menggunakan *tsaurah* yang makna akar katanya berarti menghamburkan debu.³⁰ Tetapi secara umum revolusi diartikan perubahan yang cepat pada budaya politik yang ada.

Dalam teori revolusi, Karl Marx mengatakan perkembangan masyarakat di kekuatan produksi material masyarakat berada dalam pertentangan dengan keberadaan hubungan produksi di mana mereka bekerja. Dari bentuk perkembangan kekuatan produksi berubah menjadi pengekangan (penindasan). Konflik antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama menjadi gerakan revolusi.³¹ Dari uraian tersebut Marx mengasumsikan bahwa kapitalisme akan mengarah kepada kesejahteraan dan penderitaan. Kesejahteraan dalam kelas borjuis semakin mengecil dan penderitaan dalam kelas buruh semakin membesar. Ketegangan antara borjuis dan proletariat, akan menjadikan kaum proletariat bersatu dan sadar akan kelas. Dari ketegangan itu mengarah ke revolusi yang dinamai revolusi sosial.³²

Revolusi memang mempunyai makna sentral bagi persepsi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1945-1949 itu merupakan revolusi, yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya, sebagai suatu pengalaman emosional yang luar biasa dengan rakyat yang berpartisipasi langsung.³³ Ada sebuah kenangan yang tak terlupakan di benak bangsa Indonesia akan suka duka pada masa revolusi tahun 1945-1949 tersebut.

Penyelidikan-penyelidikan akademis tentang revolusi berusaha untuk mendapat semacam tatanan mengenai masa yang pada dasarnya kacau balau. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan Islam dan kekuatan sekuler, dan sebagainya.³⁴ Dengan kata lain, dalam sebuah revolusi berdampak pada sebuah kemungkinan-kemungkinan kontradiktif yang terjadi, dan mewarnai proses revolusi tersebut.

Bagi para ahli sejarah Indonesia modern pun, revolusi ini memainkan peranan yang simbolik sebagai wadah bermacam-macam pandangan mengenai masa lampau, masa kini, dan masa depan bangsa ini. Beberapa ahli sejarah yang memandang revolusi ini sebagai produk alami dari sekian lamanya kekuasaan kolonial dan perlawanan kekuasaan yang terorganisasi sebelum Perang Dunia II, menganggapnya terutama sebagai

³⁰ Sarbini (2005). *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. 23.

³¹ Sarbini (2005). *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. 161.

³² Sarbini (2005). *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media hal. 168.

³³ J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Grafiti Pustaka Utama. Hal. 1-2.

³⁴ M.C. Ricklefs. (2005). *A History of Modern Indonesia Since 1200*. Ab. Satrio Wahono, Dkk. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi. Hal. 428-429.

suatu perjuangan kemerdekaan dan dengan rasa simpati memusatkan perhatiannya kepada para pemimpin kebangsaan yang lebih tua.³⁵ Tetapi harus diingat pula, bagaimana peranan golongan muda, meskipun cenderung lebih radikal, turut serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Para penulis lebih mecurahkan perhatian mereka pada penelitian terhadap berbagai aliran ideologi di dalam revolusi ini, misalnya nasionalis, sosial-demokrat, komunis dan Islam, atau mempelajari pergeseran kekuasaan yang menyertai perjuangan ini, atau mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang muncul untuk perubahan-perubahan sosial yang mendasar. Sedangkan penulis lain, mengamati jalannya peristiwa-peristiwa di tingkat lokal dan mengkaji cara bagaimana isu-isu nasional berjaln dengan tekanan-tekanan dari keadaan lokal.³⁶

Gagasan-gagasan revolusi akhir-akhir ini terus bergulir disebabkan kegagalan kaum reformis dalam menata bangsa dan negaranya. Untuk menjembatani hal tersebut, tentu kita tidak ingin menggagas sebuah revolusi yang tanpa sebuah perhitungan yang matang. Sehingga revolusi dengan stigma politik yang dalam sejarah sering kali menelan banyak korban dan menumpahkan darah serta tebusan nyawa, seperti dalam Revolusi Perancis dan Revolusi Rusia dapat terhindarkan.

Revolusi adalah perubahan radikal, dan fundamental dalam tata kehidupan secara cepat. Umumnya, revolusi ditandai penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha menjatuhkan. Dari sejarah kita memahami, tanpa revolusi, dinamika masyarakat berjalan lamban, tanpa adanya loncatan historik guna membangun peradaban baru, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan dan sains teknologi serta keagamaan. Bagi masyarakat yang tatanan dan sistem politiknya sudah mapan, revolusi berlangsung dalam tatanan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Sedangkan bagi masyarakat yang tatanan dan sistem politiknya sedang mencari bentuk, revolusi menjadi sesuatu yang kompleks dan beresiko tinggi.³⁷

Perbedaan paham bahwa suatu “revolusi belum selesai” atau “revolusi sudah selesai” pernah mewarnai perkembangan sejarah revolusi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendapat dan pemikiran antara Sukarno dan Muhammad Hatta. Hal tersebut bukan sekedar pemaknaan terhadap paham tentang proses revolusi itu, akan tetapi lebih jauh melihat implikasi yang diakibatkannya. Revolusi bukan sekedar slogan atau propaganda politik, akan tetapi dapat menjadi sebuah doktrin politik, apabila yang mengucapkan adalah seorang pemimpin (presiden) yang mempunyai kekuasaan. Hal itu jugalah yang pernah diungkapkan oleh Sukarno selaku presiden yang mendoktrinkan bahwa “revolusi belum selesai” hal itu berarti tidak menutup kemungkinan, dapat mengesahkan segala tindakan yang diambil sekalipun hal itu dapat saja menerobos aturan-aturan hukum. Sedangkan Muhammad Hatta sendiri lebih berpegang pada paham “revolusi sudah selesai”, dalam menilai kebijakan-kebijakannya.

³⁵ J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Grafiti Pustaka Utama. Hal. 1-2.

³⁶ J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Grafiti Pustaka Utama. Hal. 1-2.

³⁷ Musa Asy'arie (2005). Kata Pengantar dalam buku *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. xi

E. Revolusi Menurut Pemikiran Sukarno

Sukarno bagi bangsa Indonesia adalah salah satu sosok pahlawan revolusi yang mempunyai peranan dan pemikiran yang bervisi jauh ke depan. Ide-idenya selalu dilontarkan dalam berbagai forum dengan penuh kharisma kepemimpinan. Pemikirannya tentang jalannya revolusi di Indonesia juga mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno selalu menegaskan, hingga di ujung akhir kekuasaannya, bahwa “revolusi belum selesai”. Ia juga pernah mengatakan bahwa revolusi tidak akan pernah berhasil jika dipimpin oleh ahli hukum, karena segala perubahan yang seharusnya cepat diambil tidak akan terlaksana karena ahli hukum itu akan banyak berkutut dengan persoalan keabsahan (legalitas). Masuk akal juga apa yang diungkapkan oleh Bung Karno, karena bangsa Indonesia tentu akan selalu melakukan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Bung Karno kemudian membagi tingkatan-tingkatan revolusi. Tahun 1945-1955, menurutnya adalah tingkat *physical revolution*. Dalam tingkatan ini Indonesia memiliki fase merebut dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari tangan imperialis, karena fase ini ditandai dengan upaya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan mengobankan darah. Periode 1945-1950 disebutnya periode revolusi fisik. Tahun 1950-1955, merupakan tahun-tahun untuk bertahan hidup. Tingkatan ini dinamakan tingkatan *survival*. *Survival* berarti tetap hidup, tidak mati. Walaupun mengalami lima tahun revolusi fisik (*physical revolution*), Indonesia tetap berdiri. Karena itu, tahun 1950-1955 adalah tahun penyembuhan luka-luka, tahun untuk menebus segala penderitaan yang dialami dalam revolusi fisik. Tahun 1956 memasuki satu periode baru, yaitu periode revolusi sosial-ekonomi, untuk mencapai tujuan terakhir revolusi kita, yaitu suatu masyarakat yang adil makmur “*tata-tentrem-karta-raharja*”³⁸. Tepatnya, periode tahun 1955-sekarang (dan seterusnya) adalah periode *investment*, yaitu *investment of human skill, material investment, mental investment*. *Investment-investment* itu semuanya adalah untuk *socialist construction* yaitu untuk amanat penderitaan rakyat.³⁹

Revolusi nasional merupakan upaya mendobrak segala belenggu kapitalisme, hukum-hukum penjajah, dalam arti destruktif, akan tetapi simultan dengan itu, tenaga-tenaga konstruktif bekerja, menggembleng dan membangun negara baru, pemerintah baru, hukum-hukum baru, alat-alat produksi baru, dan lain-lain yang serba baru. Sementara itu, juga dipersiapkan berangsur-angsur, syarat untuk berlakunya revolusi sosial. Revolusi nasional tidak bisa bebarengan sekaligus dengan revolusi sosial. Revolusi nasional yang merupakan tugas sejarah harus selesai terlebih dahulu sebelum diganti oleh fase revolusi sosial. Berapa lama pergantian itu?⁴⁰

Bung Karno tidak bisa menjawab pasti lamanya waktu, karena hal itu bukanlah pekerjaan kecil. Ia menegaskan, jangankan yang berkesejahteraan sosial, menyusun masyarakat yang normal saja tidak mungkin sebelum selesainya soal-soal nasional. Jadi waktunya bisa bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, tapi yang jelas bukan hitungan

³⁸ Wawan Tunggal Alam. (2003). *Demi Bangsa Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 461-462.

³⁹ Departemen Penerangan RI. (1963). *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*. Surabaya: Pertjetakan Negara & Pers Nasional. Hal. 158.

⁴⁰ Wawan Tunggal Alam. (2003). *Demi Bangsa Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 462.

bulan. Sekedar contoh yaitu Revolusi Perancis berlangsung selama 80 tahun, dan Revolusi Rusia berlangsung selama 40 tahun. Singkatnya, pergerakan menuju revolusi sosial bukan pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan itu harus merupakan pergerakan yang ingin mengubah sikap masyarakat sesuai dengan tujuannya ialah suatu masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Bung Karno, revolusi sosial adalah suatu proses menuju suatu masyarakat Indonesia tanpa kapitalisme. Bung Karno ingin menggunakan revolusi sosial untuk mengakhiri kapitalisme. Dan selanjutnya, dengan alat revolusi pula mencapai cita-cita kemerdekaan.⁴¹

Menurut Bung Karno, revolusi belum selesai, dan masih berjalan terus, terus, dan sekali lagi terus. Logika revolusioner adalah sekali kita mencetuskan revolusi, kita harus meneruskan revolusi itu, sampai segala cita-citanya terlaksana. Ini secara mutlak merupakan hukum revolusi, yang tidak dapat dielakan lagi, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena itu, jangan berkata bahwa “revolusi sudah selesai” padahal revolusi sedang berjalan, dan jangan mencoba membendung atau menentang atau menghambat suatu phase revolusi, padahal phase itu merupakan kelanjutan daripada revolusi.⁴²

Selain itu, Bung Karno juga sangat terkenal dengan pernyataan-pernyataannya yang berkaitan dengan semangat revolusi melalui berbagai pidato, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴³

Hayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri mari berjalan terus! Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai! Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli ia dari bangsa apapun, ia akan digiling digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau fihak belanda menentangnya, dengan misalnya tidak mau menyudahi kolonialismenya di Irian Barat, satu hari akan datang, entah esok, entah lusa, yang ia pasti digiling digilas oleh sejarah. Tetapi sebaliknya pun, kalau engkau menentangnya, engkau pun akan digiling digilas oleh sejarah.

(Pidato Proklamasi 17 Agustus 1951)

Those three, then are the essentials of true national revolution. First, national independence; second, national ideology; third, a national leadership.

(Pidato di Los Angeles, 1961)

Jikalau kita meninggalkan dasar-dasar asli daripada proklamasi kita ini. Jikalau kita menyimpang dari pada cita-cita asli daripada revolusi nasional ini. Maka akan pecahlah persatuan bangsa kita. Akan berantakanlah revolusi kita ini sebagai revolusi nasional. Mungkin datanglah revolusi baru. Revolusi apa? Wallahu a'lam.

(Pidato Proklamasi 17 Agustus 1954)

Kita merombak, tetapi kita juga membangun! Kita membangun, dan untuk itu kita merombak. Kita membongkar, kita mencabut, kita menjebol! Semua itu untuk dapat membangun revolusi adalah “build tomorrow” dan “reject yesterday”. Revolusi adalah “construct tomorrow” dan “pull down yesterday”. Hakekat revolusi adalah perombakan,

⁴¹ Wawan Tunggal Alam. (2003). *Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 462.

⁴² Departemen Penerangan RI. (1963). *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*. Surabaya: Pertjetakan Negara & Pers Nasional. Hal. 162.

⁴³ Wawan Tunggal Alam. (2001). *Mutiara Kata Bung Karno (Untuk Rakyat Indonesia)*. Jakarta: Millennium Publisher. Hal. 124-125.

penjebolan, penghancuran, pembinasaaan dari semua apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan keadaan yang memicu untuk melahirkan keadaan yang baru.

(Pidato Proklamasi 17 Agustus 1960)

F. Menurut Pemikiran Muhammad Hatta

Muhammad Hatta juga merupakan sosok pahlawan revolusi yang mempunyai peranan dan pemikiran yang konstruktif bagi bangsa Indonesia. Sebagai seorang Wakil Presiden pada masanya, Bung Hatta juga mencetuskan ide-ide yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia dalam upaya menggelorakan semangat revolusi. Akan tetapi sering pula, pemikiran Bung Hatta berseberangan dengan pemikiran Bung Karno selaku presiden pada waktu itu tentang revolusi. Bung Hatta mempunyai prinsip bahwa “revolusi sudah selesai”. Sangat kontras dengan prinsip Bung Karno bahwa “revolusi belum selesai”.

Di dalam pidatonya, berkenaan dengan penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, Muhammad Hatta antara lain telah memberikan analisa singkat mengenai revolusi pada umumnya dan revolusi Indonesia pada khususnya. Menurut Bung Hatta:

.....suatu analisa yang mendalam akan menunjukkan bahwa segala pemberontakan dan perpecahan, anarki politik *avonturisme*, serta tindakan-tindakan ekonomi yang mengacaukan, adalah akibat daripada revolusi nasional yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Salah benar orang mengatakan, bahwa revolusi nasional kita belum selesai. Revolusi adalah letusan masyarakat sekonyong-konyong yang melaksanakan *unwehrtung aller wehrte*. Revolusi mengguncangkan lantai dan sendi, pasak dan tiang jadi longgar semuanya, sebab itu, saat revolusi itu tidak dapat berlaku lama, tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang masa konsolidasi untuk merealisasi hasil daripada revolusi itu. Yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-cita di dalam waktu, setelah fondamen dibentangkan. Revolusi itu sendiri sebentar saatnya, masa revolusioner dalam konsolidasi dapat berjalan lama, sampai berpuluh-puluh tahun. Demikian dengan Revolusi Perancis, demikian dengan Revolusi Rusia, demikian dengan Revolusi Kemalís (Turki) dan lain-lainnya.

Tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, sebab apabila tidak dibendung dalam waktu yang tepat, pasak dan tiang yang jadi longgar tadi terus berantakan. Sementara itu, anasir-anasir baru memasukinya, mengambil keuntungan dari situ, dan antara merdeka dan anarki, tidak terang lagi batasnya.....⁴⁴

Salah satu contoh paling kongkret perbedaan paham antara Bung Karno dengan “revolusi belum selesai” dan Bung Hatta dengan “revolusi sudah selesai” adalah dalam sikapnya terhadap upaya nasionalisasi perusahaan asing (Belanda) di Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan. Bung Karno menghendaki perusahaan-perusahaan Belanda yang dianggapnya sebagai alat kapitalisme asing itu dinasionalisasikan atau diambil alih bangsanya tanpa ganti rugi (disita) menjadi milik republik. Menurutnyanya pengambilalihan seperti itu lumrah saja dalam sebuah revolusi. Dan nasionalisasi perusahaan Belanda itu diperlukan guna membangun negara.

Bung Hatta tidak sependapat, pasalnya jika dinasionalisasikan dengan cara sita begitu saja, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan tercapai, karena kita hidup

⁴⁴ Muhammad Hatta. *Lampau dan Datang*. Pidato diucapkan pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 27 Nopember 1956. Djakarta: Pustaka Djambatan. Hal 27-28. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 289.

ditengah-tengah dunia yang dilingkari oleh negara-negara imperialis dan kapitalis. Karena itu, apabila kita ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, kita harus memberi ganti rugi, lalu dengan apa kita bisa menggantinya, sementara keuangan negara pada saat itu sedang tekor.⁴⁵

Pandangan Bung Hatta ini jelas dilandasi oleh pemahamannya bahwa “revolusi sudah selesai” hal itupun kembali ditegaskan dalam bukunya yang berjudul *Lampau dan Datang* (1956). Menurutnya, revolusi telah memuncak dengan penyerahan kedaulatan pada akhir 1949 (saat ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar). Bung Hatta bahkan menyindir Bung Karno di bukunya itu (meskipun tidak menyebut namanya), dengan mengatakan: Salah benar orang mengatakan, bahwa revolusi nasional kita belum selesai, sebab menurutnya, revolusi adalah letusan masyarakat sekonyong-konyong yang melaksanakan *unwehrtung aller wehrte*. Revolusi mengguncangkan lantai dan sendi, pasak dan tiang jadi longgar semuanya. Karena itu, revolusi tidak dapat berjalan terlalu lama, tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Dan sesudah itu harus dibendung, kemudian datang masa konsolidasi untuk merealisasi hasil revolusi itu. Jadi tegas Bung Hatta, yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-citanya menurut waktu. Revolusi itu sendiri sebentar saatnya, sedangkan masa revolusioner dalam konsolidasi dapat berjalan lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Bung Hatta pun memberi contoh Revolusi Perancis, Revolusi Rusia, dan Revolusi Turki.⁴⁶

Bung Hatta menilai apa yang terjadi dengan Republik Indonesia, seperti terjadi segala pemberontakan, anarki politik, dan *avonturisme*, serta tindakan ekonomi yang mengacaukan, adalah akibat dari revolusi yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Apabila revolusi tidak dibendung pada waktu yang tepat, maka pasak dan tiang yang jadi longgar tadi terus berantakan dan akhirnya seluruh bangunan ikut berantakan. Sementara itu, anasir-anasir baru memasukinya, mengambil keuntungan dari situ. Dan di antara merdeka dan anarki, tidak terang lagi batasnya. Karena itu Bung Hatta menegaskan bahwa “revolusi sudah selesai”.⁴⁷

G. Revolusi Menurut Pemikiran Sjahrir

Sjahrir menurut pandangan George Mc. Turnan Kahin, merupakan tokoh yang berpengaruh di hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan dan sesudahnya. Ia adalah arsitek terjadinya pergeseran sistem di bulan Nopember 1945, yaitu dari sistem presidensial sebagaimana ditetapkan dalam UUD yang pertama menjadi sistem perlementer. Suatu pergeseran yang dicapai bukan melalui perubahan UUD, melainkan dengan diterimanya suatu konvensi yang menyatakan UUD akan berjalan di dalam sistem perlementer. Kemudian selaku Perdana Menteri, dialah yang bertanggung jawab mengemudikan republik yang masih sangat muda ini dalam melewati bahaya yang

⁴⁵ Muhammad Hatta. (1983). *Kumpulan Pidato III “Masa Perjuangan Kita Sudah Habis Romantikanya”*, dalam pidato 21 Nopember 1950. Jakarta: Inti Idayu Press. Hal. 62. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 463.

⁴⁶ Deliar Noer. (1950). *Muhammad Hatta; Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. Hal. 490-491.

⁴⁷ Wawan Tunggal Alam. (2003). *Demi Bangsa Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 464.

mengelilinginya, dan ia berhasil meraih suatu tingkat pengakuan dari dunia luar bagi republik.⁴⁸

Sifat strategi Sjahrir sebagian terungkap dalam responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Agustus 1945, dan sebagian dalam manuver-manuver politik berikutnya yang menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai Perdana Menteri, dan juga dalam cara ketika pemerintahannya mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri pada waktu itu. Sejumlah asas pedoman dapat kita lihat dalam tindakan-tindakannya selama periode itu, di antaranya hanya ada yang merupakan perpanjangan atau evolusi pandangan itu dalam rangka situasi yang berkembang. Pertama, yang penting baginya adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia harus bernada istilah anti fasis. Itu merupakan konsekuensi perspektif yang sudah ia kembangkan mengenai arah perkembangan peristiwa-peristiwa di dunia pada dasa warsa 1930. Pembebasan Indonesia dan perkembangannya sebagai sebuah negara republik yang demokratis dan sosialis, mempunyai tempatnya dalam perspektif itu. Kedua, adalah kesadaran akan potensi otoriter yang terkandung dalam proses revolusi. Dengan memperhitungkan ketidakmenentuan situasi dan kemungkinan terjadinya kekacauan setelah kekalahan Jepang. Sjahrir menginginkan agar kemerdekaan diproklamasikan dengan cara yang setertib mungkin dan melalui apa yang dapat dianggap sebagai suatu otoritas Indonesia yang terbentuk dengan sebagaimana mestinya.⁴⁹

Dalam menyikapi perbedaan penilaian terhadap kegiatan Sjahrir, Sukarno dan Hatta semasa pendudukan Jepang ada dua prinsip yang saling berseberangan. Sjahrir dalam kegiatan aksinya dilakukan secara diam-diam dan sambil terus mengadakan hubungan dengan para pemimpin yang lebih tua dan terkemuka, dengan terutama memusatkan kegiatannya pada upaya membangun gerakan perlawanan bawah tanah yang menentang penguasa Jepang. Sedangkan Sukarno-Hatta memakai jalan kerja sama secara terbuka dengan pemerintah pendudukan Jepang, dan sedapat mungkin memperlunak perlakuan Jepang, dan bila mana mungkin, memanfaatkan jabatan resmi mereka di bawah kekuasaan Jepang untuk membela perjuangan kebangsaan.⁵⁰

Pada akhir bulan Oktober 1946, Sjahrir menerbitkan suatu buklet kecil, *Perjuangan Kita*, yang disebarakan selama hari-hari pertama bulan Nopember. Buklet ini besar sekali pengaruhnya terhadap pemikiran politik di Indonesia, terutama di kalangan buruh yang dulu ikut gerakan bawah tanah dan pemuda berpendidikan. Dalam buklet ini, ia berseru kepada para pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya, terutama menghindari kekerasan anti-asing dan

⁴⁸ J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Studi of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Grafiti Pustaka Utama. Hal. 7.

⁴⁹ J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Studi of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Jakarta: Grafiti Pustaka Utama. Hal. 168.

⁵⁰ J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Studi of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Jakarta: Grafiti Pustaka Utama. Hal 5.

anti-indo, dan mengerahkan kekuatan mereka ke arah pembentukan suatu pemerintah yang demokratis, non fasis dan non feodalistis.⁵¹

Orang Indonesia harus membedakan aspek bagian luar dari revolusi mereka, yaitu nasionalisme, dan aspek sosial yang merupakan bagian dalamnya. Ada bahaya besar jika dalam memusatkan aspek nasionalistis, revolusi itu berdasarkan demokrasi, aspek sosial bagian dalam itu akan dilupakan. Dengan melihat warisan feodal yang terus hidup dengan kuat, penyerapan aspek nasionalistis untuk menghilangkan aspek demokrasi internal akan menggiring ke arah fasisme adalah feodalisme dan supernasionalisme. Yang harus ditekankan dan menjadi tujuan utama revolusi Indonesia bukanlah nasionalisme, tetapi demokrasi.⁵²

Akhirnya, Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak semua pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang atau Belanda, dan mempercayakan kepemimpinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh suatu hubungan semacam itu dan yang tujuan akhirnya adalah demokrasi. Ia menyatakan:

Revolusi kita harus dipimpin oleh kelompok-kelompok demokratis yang revolusioner, dan bukan oleh kelompok-kelompok yang pernah menjadi antek-antek fasis, fasis kolonial, atau fasis militer Jepang.

Perjuangan demokrasi revolusioner itu dimulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengungkung pandangan orang-orang yang jiwanya masih termakan oleh pengaruh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang telah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang harus disingkirkan dari kepemimpinan revolusi kita, yaitu orang-orang yang pernah bekerja dalam organisasi propaganda Jepang, polisi rahasia Jepang, umumnya dalam usaha pasukan kelima Jepang. Semua orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan dan harus dibedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, semua kolaborator politik dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan di atas harus dianggap sebagai fasis sendiri atau alat dan kaki tangan Jepang, yang sudah tentu berdosa dan berkhianat kepada perjuangan revolusi rakyat.⁵³

Seperti sama-sama telah kita sadari, banyak sekali terdapat definisi mengenai revolusi. Tapi pasti bahwa semua definisi itu mengandung unsur perubahan yang besar yang menyangkut negara. Ada yang mengandung unsur paksaan (*force*) dan unsur kekerasan (*violence*) dan ada yang tidak selalu mengandung unsur-unsur itu. Definisi yang paling sederhana adalah: “*A change brought about not necessarily by force and violence, whereby one system of legality is terminated and another originated*” (perubahan yang diadakan tidak selalu dengan paksaan dan kekerasan, yang mengakhiri suatu sistem legalitas yang satu dan yang membentuk suatu sistem legalitas yang lain)⁵⁴

⁵¹ George Mc Turnan Kahin. (1995). *Nationalism and Revolutions in Indonesia*. Ab. Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press & Pustaka Sinar Harapan. Hal 207.

⁵² George Mc Turnan Kahin. (1995). *Nationalism and Revolutions in Indonesia*. Ab. Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press & Pustaka Sinar Harapan. Hal 207-208.

⁵³ Soetan Sjahrir. Onze Strijd Amsterdam 1946. (Perjuangan Kita). Yayasan Dua Puluh Oktober. t.t. hal 15 dalam George Mc Turnan Kahin. (1995). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ab. Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan. Hal 207.

⁵⁴ Liford Edward. (1924). *The Natural History of Revolution*. Hal. 2. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 292.

Tetapi barang kali definisi yang berikut lebih mendekati kenyataan, meskipun bedanya tidak sangat besar dengan definisi di atas: “*revolutions are forcible interventions, either to replace government, or to change the processes of government*” (revolusi adalah tindakan memaksa untuk mengganti pemerintah ataupun untuk mengganti proses-proses pemerintahan).⁵⁵

Dengan menggunakan definisi tersebut, maka apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 jelas merupakan suatu revolusi. Karena pada saat itu suatu sistem legalitas yang satu diganti dengan sistem legalitas yang lain, yakni sistem legalitas Kemaharajaan Jepang yang dilaksanakan oleh tentara pendudukannya di Indonesia diganti dengan sistem legalitas Indonesia merdeka, yang sehari kemudian ditegaskan sebagai Republik Indonesia. Atau dengan definisi yang satunya pemerintah yang satu diganti dengan pemerintah yang lain, yakni pemerintah bala tentara Dai Nippon, diganti dengan pemerintah Republik Indonesia. Caranya, ternyata dengan paksaan dan kekerasan, karena memperoleh hambatan dan kemudian ancaman (di daerah-daerah) dari pihak yang legalitasnya diganti.⁵⁶

Dengan demikian nampak bahwa dalam kasus revolusi Indonesia, sistem legalitas yang diganti bukan sekedar pemerintah, melainkan sesuatu bentuk kenegaraan di bawah lingkungan Kemaharajaan Jepang dengan negara Republik Indonesia. Pergantian sistem legalitas yang satu dengan yang lain terjadi seketika itu juga dengan adanya proklamasi, tanpa adanya vacuum satu hari sebagaimana dikatakan oleh para ahli. Adapun pembukaan UUD 1945 yang meliputi Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi. Proklamasi adalah titik kulminasi daripada cita-cita kemerdekaan nasional yang telah hidup di dalam alam pikiran rakyat Indonesia selama berabad-abad dan yang merupakan nilai di dalam kehidupan nasional dan kehidupan kenegaraan kita dewasa ini, karena tanpa kemerdekaan itu maka segala milik nasional kita dewasa ini akan ikut lenyap pula. Karena itulah, semasa perang kemerdekaan yang merupakan komponen fisik-militer dari pada revolusi Indonesia semboyan utamanya adalah “merdeka atau mati”. Pada masa sekarang kemerdekaan itu dirasakan sebagai *vanzelfsprekend* sebagai sesuatu yang seolah-olah “dengan sendirinya” ada, apalagi oleh generasi muda yang tidak mengalami masa-masa tatkala kemerdekaan itu mendapat ancaman yang sangat besar yang mungkin menyalakan eksistensinya, andaikata tidak dipertahankan secara mati-matian oleh rakyat bersenjata.⁵⁷

Menurut Chalmers Johnson, ada enam jenis revolusi yaitu:

1. Jacquerie (pembrontakan masal petani)
2. Millenarian Rebellion (yakni Jacquerie plus pimpinan kharismatik)
3. Anarchistic Rebellion (usaha untuk memulihkan masyarakat yang tercerai berai)

⁵⁵ Peter A.R. Calvert. (1967). “Revolution The Politics of Violence”. *Political Studies*. Vol. 15. Hal. 1, dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi* kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 292.

⁵⁶ Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta yang ke-70. hal. 292-293.

⁵⁷ Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta yang ke-70. hal. 298.

4. Jacobin-Comunis Revolution (revolusi sosial yang seponatan seperti di Perancis dan Rusia)
5. Conspiration Coup d'Etat
6. Militarized Mass Insurrection (revolusi nasional dan sosial yang diperhitungkan, yang menggunakan perang gerilya)⁵⁸

Kategorisasi tersebut belum tentu dapat diterima sepenuhnya. Namun barangkali bagi analisa terhadap Revolusi Indonesia, dapat kita masukan ke dalam jenis kategori yang ke enam, yakni *Militarized Mass Insurrection*.

Mengenai sebab-sebab pecahnya suatu revolusi, juga terdapat beberapa definisi, tetapi pada umumnya dibedakan sebab jangka pendek dan sebab jangka panjang. Harry Eckstein mengungkapkan:

1. *Preconditions, (the circumstances that make it possible for the precipitant to produce violence)*, lengkungan keadaan yang memungkinkan pencetus an unruk menghasilkan kekerasan.
2. *Precipitant, (an event that actually initiates violence)*, suatu kejadian yang benar-benar menggerakkan kekerasan.⁵⁹

Chalmer Johnson mengajukan sebagai sebab-sebab bagi pecahnya revolusi:

1. *Dysfunctions, (conditions that put a social system out of equilibrium)*, kondisi-kondisi yang merusak keseimbangan di dalam suatu sistem sosial.
2. *Accelerators, (of dysfunctions), or triggers (occurrences that catalyze or throw into relief the already existent revolutionary level of dysfunctions. They do not of themselves cause revolution, but when they do occur in a system already bearing the necessary of dysfunctions.....they will provide the sufficient cause of the immediately following revolution)*, kejadian-kejadian yang mengkatalisasi atau menajamkan sesuatu tahap revolusioner daripada disfungsi. Kejadian-kejadian itu pada dirinya tidak menyebabkan revolusi, tetapi jika terjadi dalam sesuatu sistem yang telah mencapai tahap yang diperlukan dari pada disfungsi..... maka kejadian-kejadian itu akan menjadi lantaran bagi timbulnya revolusi yang segera menyusulnya.⁶⁰

Kesimpulan kita ialah pada umumnya dapat dikatakan bahwa sesuatu revolusi adalah sebab-sebab jangka panjang dan sebab-sebab pendek atau lantaran. Bagi revolusi Indonesia, prekondisi yang merupakan sebab jangka panjangnya adalah:

1. Cita-cita kemerdekaan yang senantiasa hidup di dalam kalangan rakyat Indonesia dengan yang telah diperjuangkan dengan cara-cara parlementer modern sejauh keadaan mengizinkan oleh pergerakan nasional Indonesia pada zaman Hindia Belanda dan pada zaman pendudukan Jepang.

⁵⁸ Chalmers Johnson. (1964). *Revolution and the Social System*. Hal. 27-28. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 293.

⁵⁹ Harry Eckstein. (1965). "On Actiology of Internal Wars", *History and Theory*. Vol. 4. hal 41. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 293-294.

⁶⁰ Chalmers Johnson. (1964). *Revolution and the Social System*. Hal. 27-28. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 295.

2. Janji-janji pihak Jepang, yang menajamkan selera kemerdekaan bangsa Indonesia.
3. Kapitulasi pihak Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, yang menyebabkan “*power deflation*” di pihak kekuasaan Jepang dan “*loss of authority*” di mata rakyat Indonesia daripada pemerintahan balatentara Jepang.⁶¹

Adapun sebab jangka pendek atau lantaran bagi pecahnya revolusi Indonesia adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi itu yang meledakan tindakan-tindakan memaksa terhadap pihak Jepang, ada yang dengan kekerasan, ada yang tidak. Untuk menyerahkan kedaulatannya kepada aparat Republik Indonesia. Hal itu jelas jika diikuti apa yang terjadi di seluruh Indonesia setelah proklamasi.⁶²

Liford Edward berpendapat, bahwa suatu revolusi dapat dianggap berakhir, jika telah tercapai suatu persetujuan kerja (*working agreement*) antara pelbagai pihak yang terlibat di dalam revolusi itu. Dengan adanya persetujuan itu akan tercapai sesuatu keseimbangan baru, karena prinsip-prinsip utama yang telah ditegaskan oleh revolusi itu tidak lagi merupakan bahan sengketa.⁶³

Bagi revolusi Indonesia, saat itu tiba dengan implementasi dari pada Persetujuan Den Haag, sebagai hasil daripada KMB, yang merupakan kompromi besar antara pelbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik kaum republiken, kaum federal, maupun pihak Belanda. Masa sesudah saat itu, yakni pengakuan kedaulatan 29 Desember 1949 adalah masa konsolidasi seperti apa yang diungkapkan oleh Bung Hatta. Dengan demikian jelas kiranya bahwa proklamasi merupakan titik tolak besar di dalam kehidupan nasional kita, merupakan garis pemisah tajam antara jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan, dan merupakan pemicu yang mencetuskan revolusi Indonesia yang berjalan selama empat tahun lebih dan yang kemudian disusul dengan masa konsolidasi yang hingga kini masih berjalan terus.⁶⁴

Revolusi Indonesia sudah dilaksanakan dan mendapat reaksi hebat di seluruh pelosok nusantara. Suatu simbol revolusioner yang lebih luas, simbol revolusioner yang mengandung persamaan dan persaudaraan, adalah cara panggilan yang diperkenalkan oleh Sukarno yang segera menjadi populer di seluruh Indonesia. Gagasan yang dikandungnya mungkin paling dapat dianggap sebagai suatu sintesa dari “saudara revolusioner”, “saudara nasionalis Indonesia”, dan “saudara republiken”⁶⁵ Simbol revolusioner tersebut menjadi pemicu gerakan revolusi sosial di berbagai daerah.

Tuntutan revolusi kian nyaring terdengar di mana-mana, dengan semakin terpuruknya kehidupan wong cilik. Revolusi dapat diyakini menjadi jalan untuk

⁶¹ Chalmers Johnson. “Revolutionary Change”, hal 90-91. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 295.

⁶² Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 295.

⁶³ Liford Edward. (1924). *The Natural History of Revolution*. Hal. 2. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 298.

⁶⁴ Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70. Hal. 298-299.

⁶⁵ George Mc Turnan Kahin. (1995). *Nationalism and Revolutions in Indonesia*. Ab. Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press & Pustaka Sinar Harapan. Hal 175.

melakukan lompatan sejarah peradaban suatu bangsa. Revolusi memang penting, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah konsep rekonstruksi dan restrukturisasinya yang harus jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kompleks, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun agama. Kompleksitasnya memerlukan keteladanan, kecerdasan, kearifan, seluruh komponen bangsa karena revolusi bukan pekerjaan individual tetapi kolektif.⁶⁶

H. Revolusi Di Aceh

Daerah Istimewa Aceh (sekarang Nangro Aceh Darusalam) disebut sebagai salah satu daerah istimewa didasarkan pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Keputusan Wakil Perdana Menteri I pada tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan status Propinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan keputusan itu, Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki tiga keistimewaan yang diakui oleh Undang-Undang yaitu di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.⁶⁷

Secara geografis, Propinsi Daerah Istimewa Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera atau di wilayah paling barat dari Indonesia, yaitu pada posisi 2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur. Ditinjau dari segi lingkungan yang berbatasan dengan daerah ini, terlihat bahwa di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara. Letak geografis Daerah Istimewa Aceh sangat strategis sehingga merupakan pintu gerbang sebelah barat Kepulauan Indonesia. Di samping itu, karena sebagian wilayahnya di pantai utara terletak di Selat Malaka, maka daerah ini penting pula dipandang dari sudut lalu lintas internasional sejak permulaan tarikh Masehi.⁶⁸

Aceh juga mengalami dinamika revolusi sosial yang hebat. Permusuhan sengit antara pemimpin agama (ulama) dan para bangsawan birokrat (ulebalang) mengakibatkan timbulnya suatu perubahan yang permanen di tingkat elit.⁶⁹ Kejadian yang dikenal dengan Peristiwa Cumbok itu terjadi pada akhir 1945 dan dinamakan demikian karena mengikuti nama sebuah wilayah di Kabupaten Pidie tempat markas besar front ulebalang. Peristiwa ini juga kadang-kadang disebut sebagai revolusi sosial atau sebagai bagian dari revolusi nasional sebab mereka menganggap Peristiwa Cumbok itu sebagai pertentangan antara unsur-unsur yang pro dan anti-Republik.⁷⁰

Bagi kaum ulama, peristiwa ini tidak mempunyai suatu hubungan apapun dengan garis konflik ulama-ulebalang, karena mereka berpendapat bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi seandainya kaum ulebalang tidak menentang Republik. Presiden Sukarno lebih suka menamainya sebagai suatu revolusi sosial. Ketika menggambarkan perbedaan antara revolusi nasional dengan revolusi sosial, Presiden Sukarno mengemukakan bahwa

⁶⁶ Musa Asy'arie Kata Pengantar dalam buku *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. xiii.

⁶⁷ Muhammad Gade Ismail, Dkk. (1994). *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus Darul Islam di Aceh*. Jakarta: Depdikbud. Hal. 7

⁶⁸ Muhammad Gade Ismail, Dkk. (1994). *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus Darul Islam di Aceh*. Jakarta: Depdikbud. Hal. 7

⁶⁹ M.C. Ricklefs. (2005). *A History of Modern Indonesia Since 1200*. Ab. Satrio Wahono, Dkk. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi. Hal. 443.

⁷⁰ Nazaruddin Sjamsuddin. (1999). *Revolusi di Serambi Mekah; Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press. Hal. 142.

konflik itu bukanlah bagian dari revolusi nasional melainkan sebuah revolusi sosial, karena di dalamnya terlibat dua kekuatan nasional yang saling bertikai satu sama lain.⁷¹

Para ulebalang gagal melaksanakan perlawanan terpadu terhadap kekuatan-kekuatan pro-Republik yang dipimpin oleh para ulama. Antara bulan Desember 1945 dan Maret 1946, para ulebalang Aceh yang terkemuka beserta keluarga mereka dijebloskan ke dalam penjara atau dibunuh. Dengan demikian perpecahan sosial yang keras, yang berakar pada Perang Aceh dan pada konflik-konflik yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah, pengadilan dan pemerintahan diselesaikan dengan digantinya dominasi ulebalang untuk selamanya oleh para pemimpin Islam.⁷²

I. Revolusi Di Surakarta

Revolusi yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan sosial. Perubahan tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, yang secara psikologis menjadi bagian dari proses revolusi tersebut. Latar belakang kehidupan masyarakat baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya serta sisi kehidupan yang lainnya turut mewarnai proses jalannya perubahan sosial tersebut.

Revolusi merupakan konsep yang jelas dan operasional untuk rekonstruksi dan restrukturisasi kekuasaan secara total dalam sistem kehidupan yang egaliter adil, dan populis. Jika tidak, revolusi tidak akan pernah selesai dan akan mengalami jatuh bangun kekuasaan tanpa arus yang jelas dan meminta korban yang banyak. Kita tidak perlu takut pada revolusi karena tanpa revolusi pun NKRI telah meminta korban besar, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik untuk mempertahankan maupun menentangnya. Revolusi seperti pisau bermata dua, satu sisi menimbulkan anarki, di sisi lain dapat menjadi loncatan peradaban yang lebih tinggi. Karena itu, revolusi memerlukan konsolidasi total untuk rekonstruksi dan restrukturisasi kekuasaan dan menjadi tonggak sejarah bangkitnya kesadaran baru yang lebih berdasarkan supermasi hukum.⁷³

Jika sejarah digerakan adanya *creative minority*, maka *creative minority* dalam revolusi harus dijiwai semangat dan konsistensi keteladanan sosial, moral, dan intelektual yang kuat. Sehingga dengan demikian dapat membentuk sistem politik dan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif agar pembusukan birokrasi dapat diatasi lebih rasional dan profesional guna memberi pelayanan yang berkualitas kepada publik, sekaligus memperkecil kecenderungan seorang penguasa memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.⁷⁴

Pada awal abad XX Surakarta dan Yogyakarta menduduki suatu wilayah di Jawa Tengah yang oleh Belanda disebut daerah *Vorstenlanden*, secara harafiah berarti “Tanah Raja-raja”, tetapi lebih pantas diterjemahkan sebagai “Daerah Kerajaan Jawa”. *Vorstenlanden* merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua karesidenan. Tetapi wilayah ini mempunyai status yang khusus,

⁷¹ Nazaruddin Sjamsuddin. (1999). *Revolusi di Serambi Mekah; Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press hal 142-143.

⁷² M.C. Ricklefs. (2005). *A History of Modern Indonesia Since 1200*. Ab. Satrio Wahono, Dkk. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi. Hal. 444.

⁷³ Musa Asy'arie Kata Pengantar dalam Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. xiii.

⁷⁴ Musa Asy'arie Kata Pengantar dalam buku *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. xiii.

walaupun agak mendua, sebab dua karesidenan ini terdiri dari dua kerajaan swapraja yang nominal. Kerajaan yang semi otonom ini adalah hasil sampingan yang aneh dari hubungan Belanda-Jawa. Karesidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu kerajaan atau Kasunanan Surakarta, milik Susuhunan (Yang Disanjung), dan Mangkunegaran, wilayah Pangeran Mangkunegara (Ribaan Negara). Kedua penguasa ini mempunyai istana di ibukota Surakarta kira-kira 4/5 masuk wilayah Susuhunan, dan sisanya milik Mangkunegara.⁷⁵

Rupanya feodalisme sebagai suatu sistem sosial termasuk salah satu sasaran revolusi. Apabila feodalisme merupakan sistem sosial yang mapan, maka revolusi akan merubah sistem tersebut. Di kalangan para bangsawan banyak yang kehilangan status sosial dan politiknya karena nilai-nilai revolusi. Kerajaan Surakarta gagal membentuk daerah swapraja dan daerah istimewa.⁷⁶ Perubahan struktur politik tradisional menjadi lebih demokratis, meruntuhkan semua status sosial kebangsawanan. Mereka kehilangan sumber-sumber politik dan ekonomi untuk mendukung status sosialnya. Sedangkan sumber daya yang berupa tradisi, bahasa, seni dan kebiasaan masih dapat dipertahankan sebagai simbol sosio kultural dalam kehidupan mereka.⁷⁷

Kisah perkembangan Surakarta sangat berlainan. Di sini penguasa tradisional, Susuhunan dan Mangkunegaran, tidak bersimpati dengan revolusi, tidak mengambil tindakan yang progresif, yang akhirnya dipecat karena mereka telah kehilangan kesetiaan rakyatnya. Masa revolusi di Surakarta merupakan masa pergolakan sebab kota ini menjadi pusat kegiatan komunis, perang antar kelas, penculikan dan kekacauan umum yang merembes ke bagian-bagian lain di Jawa, dan mempengaruhi jalannya Revolusi Indonesia.⁷⁸

Krisis di Surakarta dan krisis nasional tidak dapat dilepaskan dari bencana yang dinamakan Peristiwa Tiga Juli. Di mana saja revolusi-revolusi sosial itu terjadi, maka dilampiasikan kebencian-kebencian lama terhadap Pangreh Praja yang kolaboratoris, polisi, dan alat-alat lainnya dari dua zaman penguasa kolonial; kekerasan mereka cenderung untuk berbeda menurut tingkat hancurnya tata tertib sosial selama zaman-zaman Belanda dan Jepang, jarak mereka dari pusat-pusat kekuasaan sekutu dan kehadiran golongan-golongan yang terorganisasi yang siap memberikan kepemimpinan. Dalam gaya politik mereka, revolusi-revolusi sosial itu memperagakan banyak persamaan dengan ciri-ciri gerakan pemuda; dan memang mereka sukar dipisahkan satu dari yang lain, karena pada umumnya revolusi-revolusi sosial dipimpin oleh wakil-wakil gerakan pemuda.⁷⁹ Peristiwa tersebut diwarnai dengan penurunan dari jabatan, penghinaan,

⁷⁵ George D. Larson. (1990). *Prelude to Revolution, Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942..* Ab. A.B. Lopian. *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 1

⁷⁶ Suyatno Kartodirdjo. (2007). "Feodalisme dan Revolusi Sosial di Surakarta 1945-1950" dalam *Istoria.* Volume 2, Nomor 2, Maret. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY. Hal. 22.

⁷⁷ E. Dwi Arya Wisesa. (1988). "Menghayati Sejarah Revolusi Kemerdekaan". dalam *Prisma.* No. 7, Tahun XVII. Jakarta: LP3ES. Hal. 61.

⁷⁸ George D. Larson. (1990). *Prelude to Revolution, Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942.* Ab. A.B. Lopian. *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 3.

⁷⁹ Ben Anderson. (1988). *Java in A Time of Revolution. Occupation and Resistance, 1944-1946.* Ab. Jiman Rumbo. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 366.

penculikan, atau bahkan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat atau wakil-wakil dari yang berkuasa lainnya yang dibenci.

Revolusi sosial di Surakarta, walaupun asal-mulanya sama-sama setempat, mempunyai dampak yang menentukan terhadap pemerintah nasional, bahkan merupakan prasyarat mutlak bagi krisis besar republik yang kemudian terkenal sebagai Peristiwa Tiga Juli tersebut. Bibit-bibit revolusi sosial di Surakarta di tanam menjelang akhir abad ke XIX, ketika daerah itu dibuka untuk eksploitasi intensif oleh kapitalisme perkebunan Eropa.⁸⁰ Dalam keadaan ini, tidak dapat dielakan bahwa martabat dan wibawa moral para penguasa di Jawa Tengah menurun dengan jelas, terutama di Surakarta, di tempat terdapat kebanyakan perkebunan-perkebunan besar itu. Situasi itu dibuat lebih buruk lagi oleh persaingan antara Kasunanan dan Mangkunegaran, suatu persaingan yang pada dasarnya adalah bersifat politik, tetapi diungkapkan dalam peragaan-peragaan kemegahan dan kemewahan yang bodoh.⁸¹

Di sisi lain, perubahan stuktur politik di Surakarta terjadi ketika Pemerintah Republik membentuk KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) pada September 1945 di pimpin oleh PETA (Pembela Tanah Air). KNID harus dipimpin oleh perwira PETA sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dan tugas awal untuk melucuti Jepang. Meskipun Kasunanan dan Mangkunegaran tidak mendukung KNID, tugas yang dimulai sejak akhir September berhasil memaksa Jepang menyerahkan kuasaannya. Praktis dari September hingga Oktober 1945 berdiri tiga pemerintahan yaitu Kasunanan, Mangkunegaran dan KNID. Bahkan sebuah Pemerintah Direktorium yang terdiri dari unsur-unsur Kasunanan, Mangkunegaran dan KNID tidak berjalan karena Kasunanan dan Mangkunegaran berkeinginan berdiri sendiri. Inilah yang merupakan sumber konflik di Surakarta.⁸²

Peristiwa tersebut mendorong pemuda melakukan tindakan revolusioner berupa penculikan kaum bangsawan Surakarta. Para pemuda itu sebagian berasal dari Barisan Banteng, organisasi badan perjuangan dengan jumlah anggota paling besar di Surakarta, berbasis di daerah pertanian non tebu. Suasana kacau yang diwarnai penculikan, konflik sosial, dan politik berlanjut sampai Mei 1946. Sikap anti pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dari golongan-golongan sosial politik disalurkan melalui partai politik, sehingga masalah politik lokal berubah menjadi masalah politik nasional. Pada akhirnya, Pemerintah Pusat melalui keputusan 15 Juli 1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah karesidenan. sebagai wakil residen diangkat seorang tokoh Barisan Banteng.⁸³

J. Peristiwa Tiga Daerah

Di Karesidenan Pekalongan, suatu krisis serupa telah terjadi dan tercatat dalam sejarah nasional sebagai Peristiwa Tiga Daerah. Karesidenan ini terdiri dari Kabupaten

⁸⁰ Ben Anderson. (1988). *Java in A Time of Revolution. Occupation and Resistence, 1944-1946.* Ab. Jiman Rumbo. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 380.

⁸¹ Ben Anderson. (1988). *Java in A Time of Revolution. Occupation and Resistence, 1944-1946.* Ab. Jiman Rumbo. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 383.

⁸² E. Dwi Arya Wisesa. (1988). "Menghayati Sejarah Revolusi Kemerdekaan". dalam *Prisma* No. 7, Tahun XVII. Jakarta LP3ES. hal 61.

⁸³ E. Dwi Arya Wisesa. (1988). "Menghayati Sejarah Revolusi Kemerdekaan". dalam *Prisma* No. 7, Tahun XVII. Jakarta LP3ES. hal 61.

Brebes, Tegal, dan Pemalang. Letak daerah yang bersebrangan satu sama lainnya mengakibatkan terjadinya interaksi antar masyarakatnya, sehingga ketika terjadi Peristiwa Tiga Daerah, penyebarannya pengaruhnya pun berjalan dengan cepat. Gerakan masyarakat pedesaan menentang elit birokrat, dilakukan untuk membalas tindakan-tindakan mereka di masa pendudukan Jepang dan kolonial Belanda merupakan ciri yang khas dalam dinamika revolusi. Peristiwa Tiga Daerah tersebut menjadi terkenal justru karena terjadinya peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh kaum revolusioner.

Peristiwa tiga daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revolusi Indonesia yang terjadi antara Oktober sampai Desember 1945 di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, wilayah Keresidenan Pekalongan Jawa tengah, dimana seluruh elite birokrat, *pangreh praja* (residen, bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa "didaulat" dan diganti oleh aparat pemerintahan baru, yang terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis dan Komunis. Sejarah Peristiwa Tiga Daerah penting sebagai peristiwa lokal revolusi Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi sosial dengan ciri khas tersendiri. Disini, revolusi sosial diartikan sebagai suatu revolusi untuk mengubah struktur masyarakat kolonial feodal menjadi susunan masyarakat yang lebih demokratis.⁸⁴

Setelah penyerahan dari pihak Jepang, karesidenan itu ditinggalkan tanpa penguasa. Selama bulan September pasukan Jepang yang jumlahnya kecil di daerah itu mulai mengalir ke kota-kota besar, meninggalkan pedalaman desa tanpa alat-alat penindasan yang efektif. Perlu diketahui bahwa alat pemerintah di karesidenan itu adalah satu di antara yang paling bersifat memeras di Jawa, dan kebencian rakyat telah diperbesar oleh kenyataan bahwa jumlah besar romusha telah dikumpulkan dari daerah itu untuk dipekerjakan di Banten Selatan. Sementara itu, Komite Nasional Indonesia (KNI) setempat, yang dibentuk dalam bulan September, terdiri hampir seluruhnya orang-orang yang telah menduduki jabatan tinggi dalam Hokokai atau dalam Pangreh Praja. Karena golongan-golongan ini secara luas dinggap sebagai antek-antek Jepang, maka wewenang mereka sangat mudah kena serang. Ia mulai hancur dengan cepat ketika Pemuda Barisan Pelopor setempat mulai melucuti senjata militer Jepang pada awal Oktober.⁸⁵

Apa yang terjadi di tingkat lokal di Karesidenan Pekalongan dari awal Oktober sampai Desember 1945 adalah meletusnya gerakan rakyat, yang umumnya dikenal sebagai revolusi sosial. Terjadi perlawanan rakyat yang bertujuan menghapuskan tatanan lama misalnya kepala-kepala desa, pamong desa, camat, dan wedana, serta pemerintahan kabupaten. Dalam memahami dinamikanya revolusi sosial di Tiga Daerah, harus diketahui bagaimana permulaannya, siapa pemimpinnya, apa yang terjadi dengan pejabat tatanan lama yang dianggap ternoda oleh rakyat karena menjalankan kebijaksanaan pemerintah penjajah Jepang, siapa penggantinya, dan bagaimana cara pemerintahan baru. Juga penting untuk diteliti khusus adalah peranan golongan setengah bandit yang dikenal sebagai lenggaong dalam menumbangkan pemerintahan setempat.⁸⁶

⁸⁴ Anton E. Lucas. *Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 1-2.

⁸⁵ Ben Anderson. (1988). *Java in A Time of Revolution. Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ab. Jiman Rumbo. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 370.

⁸⁶ Anton E. Lucas. *Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 141.

Pengaruh lenggaong dalam revolusi sosial tiga daerah memang jelas. Mereka memimpin aksi dombreg dan meyerang lurah-lurah semasa revolusi sosial, mereka cepat bertindak terhadap pejabat korup, khususnya lurah-lurah. Kaum lenggaong di Tiga Daerah merupakan penggerak revolusi kemerdekaan di pedesaan pada bulan oktober 1945, juga mempelopori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan mengambil alih pabrik gula yang dikuasai oleh Jepang.

K. Penutup

Sebagai kesimpulan akhir dapat ditegaskan bahwa semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; 2) kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; 4) kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*deposition*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatness and the glorification*) dari bangsanya.

Demikian pula halnya dengan negara republik Indonesia yang didirikan bersama dalam bentuk bangunan negara kebangsaan menurut teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modern yang sangat mirip dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep *bhinneka tunggal ika* (pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk sejarah. Demikian pula untuk membangun tekad kesatuan (*unity*), bangsa kita memerlukan waktu lebih dari seperempat abad dengan dipancangkannya tiga tonggak sejarah, yakni kebangkitan bangsa dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dicanangkannya manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia (1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Baru kemudian pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu asing.

Proklamasi tersebut didasarkan pada kesadaran "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa..." dan secara berkeadaban dan konstitusional, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar..." (Pembukaan UUD 1945). Unit kesatuan teritorial dan unit kesatuan bangsa yang kita nyatakan sebagai negara kebangsaan yang telah merdeka (*independent*) mencakup wilayah seluruh daerah Hindia Belanda. Kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan kesatuan kita sebagai bangsa dikat dengan kuat oleh bahasa negara "bahasa Indonesia" dan bendera negara "Sang Merah Putih"

Kepustakaan

- Anton E. Lucas. *Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ben Anderson. (1988). *Java in A Time of Revolution. Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ab. Jiman Rumbo. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chalmers Johnson. Revolutionary Change, hal 90-91. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- Chalmers Johnson. (1964). Revolution and the Social System. Hal. 27-28. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- Deliar Noer. (1950). *Muhammad Hatta; Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Penerangan RI. (1963). *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*. Surabaya: Pertjetakan Negara & Pers Nasional.
- George D. Larson. (1990). *Prelude to Revolution, Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942*. Ab. A.B. Lopian. *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- George Mc Turnan Kahin. (1995). *Nationalism and Revolutions in Indonesia*. Ab. Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press & Pustaka Sinar Harapan.
- Harry Eckstein. (1965). "On Actiology of Internal Wars", History and Theory. Vol. 4. hal 41. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- J.D. Legge. (1993). *Intellectual and Nationalism in Indonesia: A Studi of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ab. Hasan Basri. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Grafiti Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Liford Edward. (1924). *The Natural History of Revolution*. Hal. 2. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- M.C. Ricklefs. (2005). *A History of Modern Indonesia Since 1200*. Ab. Satrio Wahono, Dkk. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Muhammad Gade Ismail, Dkk. (1994). *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus Darul Islam di Aceh*. Jakarta: Depdikbud.
- Muhammad Hatta. *Lampau dan Datang*. Pidato diucapkan pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 27 Nopember 1956. Djakarta: Pustaka Djambatan. Hal 27-28. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.

- Muhammad Hatta. (1983). *Kumpulan Pidato III "Masa Perjuangan Kita Sudah Habis Romantikanya"*, dalam pidato 21 Nopember 1950. Jakarta: Inti Idayu Press. Hal. 62. dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- Musa Asy'arie Kata Pengantar dalam buku *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Piler Media.
- Nazaruddin Sjamsuddin. (1999). *Revolusi di Serambi Mekah; Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi*. kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- Peter A.R. Calvert. (1967). "Revolution The Politics of Violence". *Political Studies*. Vol. 15. Hal. 1, dalam Nugroho Notosusanto. (1972). *Proklamasi dan Revolusi* kumpulan karangan dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70.
- Sam Wineburg. (2006). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts Charting the Future of Teaching the Past*. Ab. Masri Maris. *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sarbini (2005). *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Sartono Kartodirdjo. (1984). *The Peasant's Revolt of Banten 1888*. Ab. Hasan Basri. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soetan Sjahrir. *Onze Strijd Amsterdam 1946. (Perjuangan Kita)*. Yayasan Dua Puluh Oktober. t.t. hal 15 dalam George Mc Turnan Kahin. (1995). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ab. Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan.
- Wawan Tunggal Alam. (2003). *Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

- E. Dwi Arya Wisesa. (1988). "Menghayati Sejarah Revolusi Kemerdekaan". dalam *Prisma* No. 7, Tahun XVII. Jakarta: LP3ES.
- Suyatno Kartodirdjo. (2007). "Feodalisme dan Revolusi Sosial di Surakarta 1945-1950" dalam *Istoria*. Volume 2, Nomor 2, Maret. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY.

Tentang Penulis :

Aman, M.Pd. Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan Program Sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY lulus tahun 1999, dan menyelesaikan Program Magister Pendidikan Sejarah pada PPS Universitas Negeri Jakarta. Saat ini mengampu mata kuliah Sejarah Tata Negara, Sejarah Indonesia Abad ke-19, Seminar Sejarah, Evaluasi Pembelajaran Sejarah,

Dasar-dasar Statistik, Strategi Pembelajaran Sosiologi, dan Perencanaan Pembelajaran Sosiologi.

